

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN**SANDY DWI ARIYANTORO**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: sunrisesandydwi@yahoo.com

Corry Liana

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Demokrasi Terpimpin dalam politik luar negerinya banyak diwarnai peristiwa-peristiwa internasional yang cukup membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dan politiknya. Masalah perdebatan dan pembebasan Irian Barat adalah salah satu peristiwa politik luar negeri yang mewarnai hubungan internasional pada masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa Demokrasi Terpimpin juga banyak diwarnai peristiwa-peristiwa internasional yang melibatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin merupakan salah satu kajian sejarah yang menarik dalam pembabakan sejarah Indonesia namun tak banyak yang menelaah teori politik luar negerinya terutama dalam dua teori besar. Permasalahan pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana karakteristik politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin? 2) Bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin? 3) Bagaimana realisme dalam politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan dampaknya? Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu memperoleh penjelasan mengenai politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Penelitian ini juga menjelaskan analisis teori realisme dalam politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Langkah awal yaitu mengumpulkan sumber-sumber terkait dengan judul penelitian yaitu Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) atau yang biasa disebut dengan heuristik, sumber primer didapat dari majalah atau koran sezaman, sedangkan sumber sekunder didapat dari buku-buku dan jurnal online. Kedua, yaitu dengan melakukan kritik sumber, memilah sumber baik primer maupun sekunder yang terkait dengan fakta mengenai perpolitikan luar negeri Indonesia pada tahun 1959-1965. Ketiga, intepretasi sumber yaitu membandingkan sumber satu dengan sumber lain sehingga diperoleh fakta sejarah mengenai politik luar negeri Indonesia masa Demokrasi Terpimpin. Terakhir historiografi, setelah semua fakta sejarah direkonstruksi sesuai dengan tema maka dilakukan penulisan sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin banyak ditujukan untuk kepentingan revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini diperjuangkan dalam bentuk diplomasi ofensif dan militer demi terwujudnya kepentingan revolusi Indonesia yaitu tuntutan kemerdekaan penuh dan penghapusan imperialisme dan kolonialisme demi terwujudnya perdamaian dunia. Dikarenakan demi tuntutan-tuntutan revolusi Indonesia dan demi menyelenggarakan negara dan dunia yang bebas dari penjajahan maka politik luar negeri Indonesia lebih cenderung bersifat realisme. Realisme dalam politik luar negeri Indonesia secara aktif bersifat radikal dan revolusioner.

Kata Kunci: Politik Luar Negeri, Soekarno, Realisme, Power

Abstract

Guided Democracy in its foreign policy has been colored by international events that bring considerable change in its society and politics. The issue of debate and liberation of West Irian is one of the foreign political events that colored international relations in the period of Guided Democracy. At the time of Guided Democracy also marked many international events involving Indonesia as part of the international community. Indonesia's foreign policy at the time of guided democracy is one of the most interesting historical studies in the history of Indonesia, but few have studied foreign policy theory, especially in the two major theories. The formulation of this research problem is 1) What is the characteristic of Indonesian foreign policy during the period of Guided Democracy? 2) How was the implementation of

Indonesian foreign policy during the period of Guided Democracy? 3) What is the realism Indonesian foreign policy at the time of Guided Democracy and the effects. The purpose of this research is to obtain an explanation of Indonesian foreign policy during Guided Democracy. This research also explains the analysis of the theory of realism in Indonesian foreign policy during the Guided Democracy.

This research method using historical research method. The first step is to collect sources related to the research title of Indonesian Foreign Policy during Guided Democracy (1959-1965) or commonly referred to as heuristic, the primary source derived from magazines or newspaper contemporaries, while the secondary sources obtained from books and online journal. Secondly, by criticizing the source, sorting out both primary and secondary sources related to the facts about Indonesian foreign politics in 1959-1965. Third, the source interpretation is comparing the source one with other sources so that the historical facts about the Indonesian foreign policy of Guided Democracy are obtained. Finally historiography, after all historical facts dirontontusi accordance with the theme then done the writing of history.

The results show that Indonesian foreign policy during the period of Guided Democracy is much intended for the interests of the Indonesian revolution. The Indonesian Revolution is fought in the form of offensive diplomacy and military for the realization of the interests of the Indonesian revolution that is the demand for full independence and the abolition of imperialism and colonialism for the realization of world peace. Due to the demands of the Indonesian revolution and for the preservation of a country and a world free from colonialism, Indonesian foreign policy was more likely to be realisme. The realism in Indonesian foreign policy was in character radical dan revolutionary.

Keywords: Foreign Policy, Soekarno, Realism, Power

PENDAHULUAN

Hubungan luar negeri Indonesia yang dirintis sejak Perang Kemerdekaan berkembang sesudah Pengakuan Kedaulatan tahun 1949. Indonesia secara internasional telah diakui sebagai negara, dan secara remi sebagai bagian masyarakat internasional pada akhir tahun 1949 melalui KMB. Pada masa setelah pengakuan kedaulatan hingga tahun 1959 atau dikenal dengan masa Demokrasi Liberal, Indonesia telah berkali-kali berganti sistem kabinet dan strategi pemerintahan. Hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana politik luar negeri Indonesia. Hubungan luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dititikberatkan pada negara-negara Asia dan negara-negara Barat karena kepentingan ekonomi Indonesia masih terkait di Eropa.¹ Perkembangan hubungan internasional Indonesia selanjutnya berada di antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pemerintahan masa Demokrasi Liberal secara resmi berakhir sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Indonesia pernah memasuki babak yang disebut dengan masa Demokrasi Terpimpin. Masa tersebut disahkan pada tahun 1959 sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan berakhir tahun 1965 akibat adanya peristiwa PKI. Masa tersebut disebut Demokrasi terpimpin karena pemerintahannya yang terpusat pada Presiden Soekarno dan pemikiran-pemikirannya. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut telah menjadi simbol awal Indonesia telah memasuki pembabakan zaman baru dalam sejarahnya.

Kabinet Karya dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959 diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Presiden Soekarno bertindak selaku perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda menjadi menteri pertama dengan dua orang wakilnya dr. Leimena dan dr. Subandrio. Program kabinet meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat.² Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam pemerintahan dan politik dalam sejarah Indonesia. Berubahnya sistem kekuasaan di Indonesia mengakibatkan pada masa Demokrasi Terpimpin juga mengalami perubahan dalam politik luar negeri.

Demokrasi Terpimpin dalam politik luar negerinya banyak diwarnai peristiwa-peristiwa internasional yang cukup membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dan politiknya. Masalah perdebatan dan pembebasan Irian Barat adalah salah satu peristiwa politik luar negeri yang mewarnai hubungan internasional pada masa Demokrasi Terpimpin. Hubungan Indonesia dengan beberapa negara seperti Belanda, Uni Soviet, Amerika, RRT, Malaysia dan sebagainya juga mewarnai politik luar negeri Indonesia. Pada masa Demokrasi Terpimpin juga banyak diwarnai peristiwa-peristiwa internasional yang melibatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang

¹Marwati Djoened dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 323.

²Ibid., hlm. 419.

melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional.³

Kajian hubungan internasional di dalamnya juga ada teori-teori yang digunakan untuk analisisnya. Sejak awal perkembangan hubungan internasional beserta teori-teorinya banyak terjadi perdebatan besar (*great debates*). Salah satu perdebatan besar dalam teori hubungan internasional adalah perdebatan antara realisme dan liberalisme. Kaum realis yakin bahwa politik internasional digambarkan sebagai politik kekuasaan. Realisme menekankan pentingnya perimbangan kekuatan yang merupakan tujuan yang sah, dan suatu petunjuk bagi kerjasama dengan negara-negara besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa melalui kekuasaan dan kekuatan, stabilitas dan perdamaian dunia dapat diselenggarakan.⁴

Berbeda dengan realisme yang menekankan aspek ambisi, terutama kehausan akan kekuasaan, liberalisme didasarkan pada prinsip-prinsip ideal kehidupan antar negara. Realisme melihat pertarungan kekuasaan adalah sesuatu yang natural, bagian dari hukum alam, sebaliknya kalangan liberal melihat bahwa perdamaianlah yang sesungguhnya merupakan keadaan normal, atau dalam kata-kata Kant 'perdamaian abadi' (*perpetual peace*).⁵ Kaum liberal meyakini bahwa melalui akal pikiran manusia dapat menyelesaikan masalah-masalah internasional, sehingga stabilitas dan perdamaian dunia dapat diwujudkan.

Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan perpolitikan luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin, serta analisis teori realisme dan dampaknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana karakteristik politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin? 2) Bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin? 3) Bagaimana realisme dalam politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan dampaknya?

Penulis tertarik dengan perpolitikan luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin karena tak banyak penelitian mengenai perolitikan luar negeri Indonesia pada waktu itu dan tidak ada yang memberikan analisis teorinya.

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah teori hubungan internasional realisme. Ide dasar realisme adalah bagaimana pandangan pesimis atas sifat manusia yang serakah dan amat menginginkan kekuasaan serta keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual yang akhirnya diselsaikan melalui perang. Realisme adalah teori hubungan internasional yang mengedepankan bagaimana kepentingan-kepentingan nasionalnya termasuk di dalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara, serta skeptisisme dalam menjalin hubungan internasional. Pemikiran tersebut mengendalikan pemikiran teoretisi hubungan internasional realis baik di masa silam maupun sekarang.

Kaum realis berjalan dengan asumsi dasar bahwa politik dunia berkembang dalam anarki internasional yaitu tidak ada pemerintahan dunia. Hal terpenting dalam kebijakan luar negeri adalah untuk membentuk dan mempertahankan kepentingan negara dalam politik dunia. Hubungan internasional terutama sebagai perjuangan untuk dominasi dan keamanan.

Pemikir awal realis melalui dilema keamanan anarki internasional, menganggap bahwa pengetahuan distribusi kekuasaan internasional sudah cukup untuk menjelaskan perilaku negara. Dunia internasional dengan begitu telah memenuhi syarat sebagai masyarakat anarkis. Hal tersebut dalam konteks yang berbeda telah dibatasi dalam pernyataan Wolfer yaitu sisi kekuasaan dan sisi ketidakpedulian.⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa perluasan hegemoni dan aliansi penting dalam realisme.

Dasar normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara: ini adalah nilai-nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis. Negara dipandang esensial untuk kehidupan warga negaranya yang baik: tanpa negara untuk menjamin alat dan kondisi keamanan kehidupan manusia terikat untuk menjadi, dalam frasa Thomas Hobbes yang terkenal, 'kesendirian, kemiskinan, sangat tidak menyenangkan, tidak berperikemanusiaan dan terbatas'. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidupnya yang berbeda dan bernilai. Kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri.⁷

Fakta bahwa semua negara harus mengejar kepentingan nasionalnya berarti negara lain tidak akan dapat diharapkan sepenuhnya. Seluruh perjanjian nasional bersifat sementara dan kondisional atas dasar kepentingan negara-negara yang terlibat. Hal tersebut membuat semua perjanjian-perjanjian, konvensi, aturan-aturan, hukum, tata cara dan lain sebagainya antar negara hanyalah pengaturan bijaksana yang dapat dikesampingkan atau

³Yanyan Mochamad Yani dan Mair, *Politik Luar Negeri*, Jurnal UNPAD Vol. 6 Tahun 2010, (http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf), diunduh pada 2 Februari 2015 pukul 10.00), hlm. 2-3.

⁴Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan (Edisi Kelima)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 168-169.

⁵Abubakar Eby Hara, *Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme*, (Bandung: Penerbit NUANSA, 2011), hlm. 62.

⁶Stefano Guzzini, *Realism in International Relations and International Political Economy*, (New York: Routledge, 2002), hlm. 110.

⁷Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Op. cit.* hlm. 113-114.

dilanggar jika berseberangan dengan kepentingan vital negara. Satu-satunya tanggung jawab fundamental warga negara adalah untuk memajukan dan mempertahankan kepentingan nasional.

Waltz menyatakan bahwa struktur hierarki dan anarki adalah perbedaan cara-cara pengorganisasian kekuatan politik, yaitu perbedaan konsekuensi bagi para aktor. Para aktor akan menyikapinya secara berbeda tergantung bagaimana mereka mengorganisasikannya. Negara berusaha keras untuk membuat kehidupan yang sebaik mungkin untuk rakyatnya. Negara harus biasa mengatasi masalah-masalah keamanan. Secara kualitas masalah-masalah kehidupan negara dapat diatasi, karena sebagian besar masalah keamanan diselesaikan dalam negeri seperti kejahatan dan pemberontakan. Kesepakatan umum dalam negara, yaitu keberadaan otoritas dalam menjalankan kekuasaan. Negara dapat fokus pada masalah kesejahteraan jika masalah keamanan dapat diredam.⁸

Pada teori realisme kita mengenal konsep *power* atau kekuasaan yang merupakan kepentingan nasional yang harus selalu dikejar oleh negara. Walaupun sering membingungkan karena begitu luas dan bermacam-macam maknanya, *power* tetap menjadi ukuran bagi analisis realis. Ia pun sering dipertukarkan dengan konsep pengaruh, kekuasaan, kekuatan senjata, perimbangan kekuasaan, kekuatan lunak (*soft power*) dan berbagai istilah lainnya. *Power* juga sering disamakan dengan uang dalam ekonomi yang perlu dicari, ditambah dan digunakan. Negara-negara, terutama negara-negara besar, sangat khawatir *power* mereka berkurang atau relatif menjadi lemah dalam hubungan dengan negara lain. Karena itu, mereka ingin selalu memastikan keseimbangan kekuasaan yang ada tidak bergeser ke pihak lawan.⁹

Menurut Mearsheimer, *power* didasarkan pada kemampuan militer yang dikuasai oleh negara. Walaupun demikian, menurutnya, negara-negara memiliki juga apa yang disebut dengan kekuatan laten yang meliputi potensi sosial ekonomi yang dapat dikembangkan untuk menjadi kekuatan militer. Kekuatan laten ini meliputi apa yang sering disebut dengan sumber-sumber kekuatan nasional oleh Morgenthau, seperti penduduk, sumber alam, ekonomi dan teknologi. Jadi mereka, mendapatkan *power* bukan saja dari menaklukkan negara lain tapi juga melalui pengelolaan *latent power* atau sumber kekuatan nasional ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan,¹⁰ yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahapan pertama adalah heuristik.

1. Heuristik merupakan tahap pertama yang dilaksanakan yaitu dengan mencari dan

mengumpulkan sumber-sumber. Melalui tahap heuristik sumber-sumber penelitian diperoleh, sumber-sumber primer maupun sekunder. Sumber primer yang telah diperoleh adalah koran *Suluh Indonesia*, *Merdeka* dan majalah *Sketmasa*, *Starweekly* edisi tahun 1959-1965. Sumber sekunder yang telah diperoleh adalah buku *Sejarah Nasional Indonesia zaman Jepang dan Zaman Republik* karya Marwati Djoned dkk terbitan tahun 2010. Buku selanjutnya adalah berjudul *Bung Karno: Ajarannya dan Pelaksanaannya* karya H. Bachtiar Djamily terbitan tahun 1987. Buku berjudul *Cakrawala Politik Era Sukarno* karya Ganis Harsono terbitan tahun 1985 dan buku berjudul *Dari Sukarno ke Soeharto* karya Marshall Green terbitan tahun 1992 dan buku-buku yang dicari adalah buku-buku setema seperti buku yang membahas Bung Karno dan pemikiran-pemikirannya, marhaenisme, ekonomi terpimpin, politik bebas aktif dan sebagainya, pembebasan Irian Barat, Konfrontasi Malaysia, sejarah hubungan internasional, politik luar negeri Indonesia.

2. Kritik adalah tahap kedua setelah mendapatkan sumber-sumber penelitian. Pada tahap kritik yang dilakukan yaitu menguji keaslian sumber-sumber yang telah didapat. Tahap kritik dilakukan untuk memperoleh fakta yang akurat dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 2 macam kritik yang dilakukan, yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui otentitas dari sumber yang didapat melalui bentuk fisik maupun sumber penulisan data. Sedangkan kritik internal dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh agar sesuai dengan keterkaitan pada penelitian. Metode kritik internal yang dilakukan adalah membandingkan sumber dengan sumber pemberitaan dari luar negeri yang berbahasa Inggris. Analisis kritik selanjutnya adalah mengelompokkan sumber-sumber bertema politik luar negeri realisme. Metode kritik ini kemudian memunculkan fakta sejarah.
3. Interpretasi adalah tahap ketiga yang dilakukan setelah kritik. Pada tahap ini fakta sejarah dari data-data primer maupun sekunder diinterpretasikan atau ditafsirkan menjadi serangkaian cerita sejarah dan disesuaikan dengan penelitian. Analisis realisme pada fakta sejarah digunakan untuk menafsirkan atau menjelaskan lebih terperinci mengenai bahasan tema. Periodisasi data-data yang telah dikumpulkan

⁸Cynthia Weber, *International Relations Theory: A Critical Introduction (Fourth Edition)*, (New York: Routledge, 2014), hlm. 23.

⁹Abubakar Eby Hara, *Op. cit.* hlm. 38.

¹⁰Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Sura6baya: Unesa University Press, 2005), Ihlm. 10-11.

penting untuk dilakukan pada tahap ini agar realitas dari peristiwa yang terjadi pada masa tersebut dapat disusun secara berkesinambungan. Bantuan konsep-konsep dari lintas ilmu dapat digunakan dalam kegiatan ini. Penulis akan menggunakan bantuan konsep teori hubungan internasional, pembangunan ekonomi, pemikiran Soekarno dan Manipol USDEK.

4. Historiografi adalah tahapan terakhir yang harus dilaksanakan. Hasil rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya akan disajikan sejarah kronologis sebagai rekonstruksi peristiwa sejarah. Judul yang akan digunakan adalah **“Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin”**.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bagaimana perpolitikan luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965 yang terdiri atas karakteristik dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin serta analisis teori politik luar negeri Indonesia yang lebih cenderung realisme dan dampaknya.

Pembahasan pertama mengenai karakteristik dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Hasil penelitian ini mencakup dasar dan arah politik luar negeri Indonesia serta diplomasi, militer dan kerjasama ekonomi Indonesia pada waktu itu.

A. Dasar dan Arah Politik Luar Negeri Indonesia

Semenjak ditetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekrit presiden 5 Juli 1959, terdapat serangkaian dokumen yang mendasari politik luar negeri Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945, Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama “Jalannya Revolusi Kita” yang terkenal sebagai “Manifesto Politik Republik Indonesia” dan Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Majelis Umum PBB yang berjudul *“To Build the World Anew”*¹¹.

Dasar politik luar negeri Indonesia juga termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas

dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan”

Dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 terdapat dua pasal yang mengatur wewenang Presiden di bidang hubungan luar negeri. Kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Pasal 11 berbunyi : “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.
- (b) Pasal 13 berbunyi : “(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul. (2) Presiden menerima Duta Negara lain.”

Dewan pertimbangan Agung, dalam keputusannya No. 1/Kpts/Sd/61, tanggal 19 Januari 1961, tentang Perincian Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia, menetapkan penegasan tentang cara-cara melaksanakan Manipol di bidang politik luar negeri dengan mengambil bagian dari pidato “Jalannya Revolusi Kita” 1960 yang berbunyi

“Kita tidak netral, kita tidak penonton kosong daripada kejadian-kejadian dunia ini, kita tidak tanpa prinsip...kita tidak tanpa pendirian. Kita menjalankan politik bebas itu tidak sekadar “cuci tangan”, tidak sekadar defensive, tidak sekadar apologetis. Kita aktif, kita berprinsip kita berpendirian! Prinsip kita ialah terang Pancasila, pendirian kita ialah aktif menuju kepada persahabatan segala bangsa, aktif menuju kepada lenyapnya exploitation de l’homme par l’homme, aktif menentang dan menghantam segala macam imperialisme dan kolonialisme dimanapun ia berada. Pendirian kita yang “bebas dan aktif” itu, secara aktif pula setapak demi setapak harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri, agar supaya tidak berat sebelah ke Barat atau ke Timur”.

Sifat politik Indonesia yang bebas dan aktif dimaknai dalam artian berhak menentukan penilaian dan

¹¹ Marwati Djoened dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 446-447.

sikap bangsa Indonesia terhadap masalah-masalah dunia dan bebas dari keterikatan pada salah satu blok kekuatan di dunia serta persekutuan militernya. Politik luar negeri Indonesia juga mengartikan bahwa Indonesia secara aktif dan konstruktif berupaya menyumbang tercapainya kemerdekaan yang hakiki, perdamaian dan keadilan di dunia, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan “Jalannya Revolusi Kita” revolusi Indonesia mempunyai dua tujuan dan dua tahap yaitu, pada tahap pertama mencapai kemerdekaan penuh dan demokratis, bersih dari imperialisme dan feodalisme serta sebagai syarat mutlak untuk memasuki tahap kedua. Tahap kedua revolusi Indonesia adalah mencapai tahap sosialisme Indonesia yaitu bersih dari kapitalisme dan eksploitasi manusia.

Dalam “Jalannya Revolusi Kita” dijelaskan bahwa cara melaksanakan harus dengan gotong royong yang merupakan sifat dan kepribadian Indonesia serta menggalang persatuan rakyat revolusioner dengan membentuk Front Nasional. Selanjutnya harus diadakan *retooling* alat negara, terutama lembaga dan aparat pemerintah.

Berdasarkan “Jalannya Revolusi Kita”, bahwa politik luar negeri Indonesia tidak netral, tidak tanpa prinsip dan tidak tanpa pendirian, aktif menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia, persahabatan dengan semua bangsa, menentang imperialisme dan kolonialisme. Hubungan ekonomi dengan negara lain harus diselenggarakan secara tidak berat sebelah ke Barat atau ke Timur.

Setiap regulasi dalam politik luar negeri Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan kepentingan dan keamanan nasional. Pertahanan diri juga digalakkan serta penguatan militer juga ditingkatkan demi mencapai tujuan-tujuan nasionalnya dalam kancah internasional.

Perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan Indonesia juga bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya dalam menciptakan perdamaian dunia yang bebas dari penjajahan. Bukan sekadar upaya-upaya diplomasi saja yang diperlukan untuk menghadapi bangsa-bangsa di dunia dalam mewujudkan perdamaian tanpa penjajahan namun kekuatan dari militer serta pertahanan juga harus ditingkatkan. Indonesia sadar secara penuh dalam merumuskan setiap peraturan-peraturannya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang luhur namun juga harus tegas dan ofensif demi mendapatkan kemerdekaan penuh.

Arah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin adalah jelas ingin

mewujudkan kemerdekaan penuh nasionalnya dengan menjalankan revolusinya yang berdasarkan akan sikap yang bebas dan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dalam upaya-upaya menghimpun kawan yang dikonfrontasikan dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin juga berarah ke tujuan-tujuan dan pandangan-pandangan Presiden Soekarno dalam menciptakan kekuatan-kekuatan diplomasi, militer dan keamanan Negara demi melawan imperialisme, kolonialisme dan *Oldefos*.

Eksistensi Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam negara-negara *Nefos* jelas tercermin dalam dasar-dasar politik luar negerinya. Meskipun negara-negara non-blok seperti Indonesia juga menolak untuk disebut sebagai pihak netral ataupun blok ketiga nyatanya keberadaan negara-negara *Nefos* adalah suatu pihak yang menginginkan perdamaian yang menentang imperialisme dan kolonialisme.

Di bawah ini dipaparkan daftar negara-negara yang tergolong *Nefos* (*New Emerging Forces*) ini, diurutkan dari Asia dulu.

Asia Tenggara : Republik Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok, Kerajaan Kamboja, Republik Demokrasi Vietnam (Vietnam Utara), Republik Demokrasi Korea (Korea Utara), Republik Laos.

Asia Tengah : Republik India, Srilanka, Republik Birma, Republik, Republik Pakistan.

Afrika : Republik Ghana, Republik Nigeria, Republik Mali, Republik Kamerun, Republik Kongo.

Arab : Republik Irak, Republik Turki, Republik Yaman, Republik Syria.

Arab Magribi : Republik Persatuan Arab, Kerajaan Maroko, Republik Tunisia, Republik Aljazair, Kerajaan Libya, Kerajaan Ethiopia, Kerajaan Sudan.

Eropa : Republik Yugoslavia.

Amerika Latin : Republik Kuba, Republik Mexico, Republik Brasilia.

Cukup jelas bahwa kekuatan satu blok yang demikian besarnya ini merupakan tandingan-tandingan yang cukup berat buat blok Uni Soviet dan blok Amerika Serikat. Namun, dijelaskan sekali lagi, bahwa pandangan-pandangan politik luar negeri dari negara-negara yang tergabung dalam *Nefos* tidaklah sama. Seperti bagaimana pandangan politik luar negeri Indonesia berbeda dengan Republik Rakyat Tiongkok, begitupun Republik Rakyat Tiongkok berpandangan lain dengan Republik Persatuan Arab dan Ghana.¹² Republik Indonesia yang termasuk dalam negara blok ketiga atau negara *Nefos* merupakan negara yang memiliki arah tujuan untuk memerangi imperialisme dan kolonialisme. Hubungan antar negara-negara *Nefos* di mana Indonesia juga salah satu anggotanya didasari akan keinginan yang sama demi memerangi *Oldefos* untuk menegakkan kukuhkan pondasi

¹²“Pandangan Politik Luar Negeri”, *Starweekly*, 15 Maret 1963, hlm. 7. Lampiran 7.

negaranya yang berlandaskan kepentingan masing-masing negara. Indonesia jelas memiliki arah yang sama dengan negara-negara *Nefos* lainnya namun pandangannya tak selalu sama.

B. Diplomasi, Militer dan Kerjasama Ekonomi Indonesia

Tentang pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia yang menempuh jalan diplomasi khususnya mengenai “diplomasi perjuangan” pada esensinya mencakup aspek-aspek serta pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Diplomasi Indonesia bukan suatu diplomasi “rutin”, melainkan suatu diplomasi perjuangan. Ini berarti, bahwa sewaktu-waktu kita dapat diperkenankan menempuh cara-cara yang “tidak konvensional”, cara-cara yang tidak terlalu terikat pada kebiasaan protokoler ataupun tugas rutin belaka. Namun ini tidak berarti mengabaikan norma-norma dalam tatakrma diplomasi internasional.
2. Diplomasi perjuangan tidak berarti sikap “gagah-gagahan” atau “radikal-radikalan”.
3. Diplomasi perjuangan adalah suatu diplomasi yang dibekali keteguhan dalam pendirian dan prinsip, ketegasan dalam sikap dasar, kegigihan dalam upaya, namun luwes dalam pendekatan. Itu semua bersumber pada kepercayaan diri masing-masing pelaku diplomasi.
4. Diplomasi perjuangan adalah suatu diplomasi yang tidak sekadar bersikap reaktif, tetapi secara aktif dinamis berperan menuju sasaran-sasaran yang jelas.
5. Diplomasi perjuangan senantiasa mencari harmoni/serasi antar negara, menjauhi sikap konfrontasi atau penggunaan politik kekerasan/kekuasaan (*power politics*), senantiasa menjembatani kepentingan-kepentingan yang saling berbeeda antar negara dan berupaya mencari kawan sebanyak mungkin serta memperkecil jumlah lawan.
6. Diplomasi perjuangan adalah diplomasi yang ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, yang tidak tersesat kedalam birokratisme teknis yang sempit. Maka diplomasi perjuangan harus aktif berprakarsa, kreatif dan asertif.

Secara politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin ditempatkan antara dua kekuatan besar yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin juga memperjuangkan secara tegas nilai-nilai antiimperialisme dan

antikolonialisme dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak pasif terhadap kejadian-kejadian di dunia. Dalam upaya-upaya tersebut memang haluan politik luar Negeri Indonesia tidak lepas dari peranan Presiden Soekarno selaku pelopor *Nefos* dan melopori perjuangan Indonesia sebagai negara yang merdeka secara penuh. Perjuangan-perjuangan tersebut Indonesia laksanakan dalam dua cara yaitu diplomasi dan agresi terutama menghadapi isu-isu pembebasan Irian Barat, konfrontasinya dengan Malaysia dan menghimpun kawan dalam menghadapi *Oldefos* dan sebagainya.

Pada tahun 1961 Jendral A. H. Nasution pernah berkata, bahwa dalam rangka usaha kita mengembalikan Irian Barat kepangkuan Ibu Pertiwi, ke dalam kekuasaan Republik Indonesia, ada kemungkinan kita diganggu dari luar maupun dalam.¹³

Jelas posisi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin telah mendapat intervensi-intervensi asing terutama mengenai masalah Irian Barat. Salah satu contohnya dalam sengketa Indonesia dan Belanda ada NATO yang letaknya jauh dari Indonesia juga ikut-ikutan membicarakan Indonesia soal Irian Barat hanya karena didalamnya Belanda yang duduk wakil Belanda yang menganggap ada kepentingan terhadap Irian Barat.

Pada masalah Irian Barat antara Indonesia dan Belanda yang sejak Demokrasi Liberal telah diupayakan diplomasi-diplomasi agar Irian Barat menjadi wilayah Indonesia seutuhnya dan demi menghapuskan total imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Diplomasi yang tak membuahkan hasil yang berarti bagi Indonesia hingga hubungan diplomasi Indonesia dan Belanda mencapai puncak ketegangannya. Hubungan yang tegang antara Indonesia dengan Belanda itu mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1960. Pada waktu itu Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah kerajaan Belanda. Indonesia secara tegas ingin segera merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.

Hanya dengan kekerasan Irian Barat dapat direbut kembali, inilah yang menjadi titik permulaan perjuangan militer Indonesia demi merebut Irian Barat. Bahkan presiden Soekarno telah menggunakan tiap kesempatan yang ada untuk menggembelng rakyat demi memperjuangkan Irian Barat supaya kembali kepada Republik Indonesia. Rakyat juga banyak yang telah aktif dalam upaya pembebasan Irian Barat. Merka rela mati

¹³“Damai ataukah Perang oleh: Letnan Son”, *Sketmasa*, Edisi November 1963. hlm 13. Lampiran 8.

berjuang demi kemerdekaan penuh Indonesia dalam perebutan Irian Barat kembali.¹⁴

Perjuangan militer dilakukan demi mencapai pembebasan Irian Barat. Berbagai persiapan dan kesiapan militer juga pemerintah RI laksanakan demi merebut Irian Barat. TNI juga dan bersiaga di wilayah Irian Barat guna mengantisipasi dan menghadapi konfrontasi militer Belanda di Irian Barat.¹⁵

Dalam rangka mempersiapkan kekuatan militer untuk merebut Irian Barat pemerintah RI telah mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya diharapkan Negara-negara Barat terutama Amerika mampu memberikan bantuan terhadap RI namun tidak berhasil. Pemerintah RI akhirnya mengusahakan pembelian senjata ke negara-negara blok komunis terutama Uni Sovyet. Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan secara damai kepada Indonesia maka Indonesia akan berusaha membebaskannya dengan kekuatan militer. Melalui PBB Belanda menuduh Indonesia melakukan agresi di Irian Barat. Selanjutnya Belanda memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mengirimkan kapal perangnya ke perairan Irian Barat di antaranya kapal induk *Karel Doorman*. Hingga pada tanggal 19 Desember 1961 presiden Soekarno mengeluarkan *Tri Komando Rakyat (Trikora)* untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda.

Atas dasar *Trikora* tersebut maka dimulailah konfrontasi Indonesia terhadap Belanda dalam membebaskan Irian Barat yang pada tanggal 2 Januari 1962 dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Hingga akhir tahun 1962 Komando Mandala cukup berhasil melakukan konfrontasi di Irian Barat. Kesatuan menjadi kunci penting keberhasilan konfrontasi pembebasan Irian Barat sehingga dapat mendudukkan dan mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat. Perjuangan konfrontasi ini hingga awal tahun 1963 telah memulai fase eksploitasi sehingga mampu menduduki pos-pos pertahanan musuh yang penting.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin juga terlihat dari konfrontasinya terhadap Malaysia. Malaysia yang mulai melakukan upaya-upaya kolonialisme di wilayah Asia Tenggara dengan upaya pembentukan negara Federasi Malaysia. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia menjadi terganggu Indonesia berpendirian bahwa gagasan Federasi Malaysia merupakan proyek Neokolonialis Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia.

Usaha-usaha diplomasi yang tidak membuahkan hasil sejak April 1963 yang diprakarsai oleh Filipina untuk meredakan ketegangan Indonesia dan Filipina hingga di tengah-tengah kemacetan diplomasi tahun 1964 Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 mengucapkan *Dwi Komando Rakyat (Dwikora)*. Usaha kekuatan militer akhirnya digalakkan demi tujuan politik luar negeri Indonesia yang menginginkan penghapusan imperialisme dan kolonialisme di dunia terutama dalam hal ini menghadapi neo-kolonialisme Malaysia.

Presiden Soekarno kemarin pagi telah mengomandokan kepada para pemuda dan pemudi Indonesia turut bergerak sebagai sukarelawan-sukarelawan untuk menghancurkan proyek neo-kolonialis "Malaysia". Kepala Negara juga telah memerintahkan kepada Presidium Kabinet Kerja Gaya baru untuk mengubah "catur tunggal" mulai hari ini menjadi "Panca Tunggal."¹⁶

Konfrontasi menentang pembentukan Federasi Malaysia memasuki tingkatan perang. Presiden Soekarno pada tanggal 16 Mei 1964 mengeluarkan surat keputusan untuk pembentukan Komando Siaga untuk menyelenggarakan operasi-operasi militer dalam usaha mempertahankan wilayah Indonesia dan membantu perjuangan rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah dengan mempergunakan segala pasukan bersenjata maupun sukarelawan. Selain upaya militer upaya diplomasi juga digalakkan secara bersamaan dengan melalui PBB namun.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dalam bidang ekonomi tidak lepas dari prinsip-prinsip ekonomi dalam negeri yaitu ekonomi terpimpin. Hubungan ekonomi Indonesia dengan pihak-pihak luar sangat diutamakan untuk mampu menjalin hubungan ekonomi internasional dengan negara-negara luar namun sebisa mungkin Indonesia mandiri dan tidak bergantung pada bangsa lain.

Kita dapat memilih. Menyukai system ekonomi Barat yang kapitalis liberal, atau komunis totaliter. Kedua-duanya baik bagi yang dapat

¹⁴"Nota Jang Menjetudjui Irian Barat Didjadjah Belanda", *Starweekly*, Edisi Januari 1959 hlm. 12-15. Lampiran 10.

¹⁵"Belanda Tempatkan Pesawat2 Hawker Hunter Diperaian Irian Barat", *Merdeka*, 29 April 1960, hlm. 1. Lampiran 11.

¹⁶"Komando Presiden Soekarno: DAFTARKAN DIRI SEBAGAI SUKARELAWAN UTK MENGGANJANG NEO-KOLONIALIS "MALAYSIA", *Merdeka*, 17 Maret 1964, hlm. 1. Lampiran 12.

menikmati hasil-hasilnya dan akibat-akibatnya. Tetapi kedua-duanya juga jahat bagi rakyat yang akan tetap melarat oleh karenanya. Maka sebaiknya kita anut sistem ekonomi Timur Indonesia. Yaitu: DARI DEMOKRASI TERPIMPIN TERCIPTA EKONOMI TERPIMPIN.¹⁷

Ekonomi terpimpin bangsa Indonesia juga tidak lepas dari konsep ekonomi berdikari yang Presiden Soekarno usung dalam pembangunan sektor ekonomi Indonesia. Ekonomi negara harus mampu mandiri dan tidak bergantung kuat pada bangsa lain. Ketahanan ekonomi ini dimaksudkan terhadap lebih besarnya nilai ekspor Indonesia dibandingkan dengan nilai impornya. Indonesia adalah bangsa yang kaya yang mampu memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan.

Dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin yang menuju keutuhan masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat sosialis ala Indonesia, pemerintah tetap berpedoman pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

Bunyi pasal 33 tersebut :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah terutama koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampak produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat orang banyak, boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam suatu keterangan pemerintah ditegaskan juga bahwa istilah

“dikuasai” itu jelas tidak harus ditafsirkan “dimiliki” atau “diselenggarakan” oleh pemerintah sendiri, jadi dapat diselenggarakan selain oleh pemerintah pula oleh koperasi, gabungan perseorangan dan perseorangan, akan tetapi semua hal ini jika mengenai produksi dan distribusi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus diatur dan diawasi oleh negara. Perusahaan-perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, boleh ada di tangan orang-seorang, gabungan orang-seorang tetapi pula dapat dikerjakan oleh koperasi. Dengan berpedoman pada yang diterapkan tadi untuk usaha swasta (gabungan perseorangan atau usaha perseorangan tersedia lapangan usaha sebagai berikut:

1. di lapangan produksi terutama industri kecil dan industri menengah dan di lapangan pertambangan mengenai beberapa jenis bahan galian,
2. di lapangan perdagangan luar negeri (impor-ekspor) dan dalam negeri (interinsulair), daerah dan eceran dengan pembatasan bahwa mengenai barang/bahan yang vital, misalnya ekspor bahan-bahan galian vital dan impor beras dan tekstil rakyat/benang tenun dan kapas seluruhnya tetap diselenggarakan oleh badan-badan pemerintah yang telah ada, yang sebelum ada perubahan harus kita pelihara demi kepentingan negara, dan para pekerja pada badan-badan itu,
3. di lapangan pengangkutan daerah, misalnya pelajaran pantai dan angkutan darat.¹⁸

Namun pada kenyataannya secara internasional ekonomi Indonesia mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya inflasi, kesukaran likuiditas di semua faktor, banyaknya utang luar negeri demi memperbaiki neraca khas negara dan banyaknya impor dibandingkan ekspor sebagai akibat perjuangan revolusi Indonesia.

Pembahasan kedua adalah tentang bagaimana realisme dalam politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpolitikan luar negeri Indonesia banyak diwarnai oleh politik radikal revolusioner dan konfrontasi bahkan penggunaan *power* militer.

C. Realisme Politik Luar Negeri Indonesia dan Dampaknya

Kata kunci yang mampu menjelaskan konsep politik realisme adalah *demanding* atau tuntutan. Sebuah tuntutan tak dapat diajukan tanpa mempertimbangkan kekuatan-kekuatan atau *power* yang dimiliki untuk mengajukan sebuah tuntutan seperti kekuatan militer, *gold* atau kekayaan, kekuatan ekonomi, penduduk, sumber alam dan teknologi, pengaruh dan sebagainya. Hal tersebut merupakan variable-variabel dalam penafsiran *power* dalam konsep teori realisme.

¹⁷“Indonesia Bukan Negara Kapitalis Liberal atau Komunis Totaliter”, *Starweekly*, 15 Juni 1959, hlm. 8. Lampiran 15.

¹⁸ S. F. Yupon, *Logat USDEK*, (Surabaya: Redjeki, 1960), hlm. 42-43.

Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi banyak diwarnai akan pengertian diplomasi revolusioner dan radikal. Diplomasi seperti itu ditunjukkan dalam sifat ofensif demi menuntut hak kemerdekaan penuh Indonesia dalam hal ini dikhususkan pada masalah Irian Barat. Sifatnya yang ofensif juga ditunjukkan dalam upaya-upaya menghapuskan imperialisme dan kolonialisme demi mewujudkan perdamaian dunia yang bebas dari penjajahan.

Politik luar negeri Indonesia secara tegas mengupayakan bahwa secara internasional bangsa Indonesia adalah bangsa yang mampu merdeka secara penuh. Bangsa Indonesia tidak tergantung dengan bangsa lain sehingga tak akan mengubah politik bebas Indonesia. Kebebasan Indonesia yang merupakan penjabaran bahwa Indonesia mampu bebas dari imperialisme dan kolonialisme serta tidak tergantung dan didikte oleh pihak luar.

Meskipun tujuannya adalah aktif membangun perdamaian dunia pada dasarnya politik luar negeri Indonesia secara militan juga bersifat ofensif hal tersebut dapat dicermati melalui upaya-upaya pembebasan Irian Barat yang tampak nyata perjuangan diplomasi dan militernya. Tanpa perjuangan militer yang berarti dalam hal ini adalah hubungannya dengan *Trikora* Indonesia takkan mampu membebaskan Irian Barat dari pembentukan negara Papua oleh Belanda. Hal tersebut nampak jelas bahwa Belanda mencoba menancapkan kolonialismenya di tanah Papua namun Indonesia tidak tinggal diam demi kesatuan dan tuntutan akan kemerdekaan penuh Indonesia menggunakan dua jalan diplomasi dan militer demi membebaskan Irian Barat.

Presiden selaku presiden dan panglima terting pada masa Demokrasi Terpimpin telah tegas mengomando kekuatan militernya untuk melawan Belanda dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jika Belanda menggunakan paksaan (militer) untuk memaksa rakyat Irian Barat maka Indonesia juga berhak menggunakan paksaan (militer) untuk mengeluarkan Belanda dari wilayah itu. Indonesia perlu menyatukan segalanya untuk menyerang Belanda di Irian Barat. Presiden Soekarno tidak puas dengan resolusi-resolusi. Presiden Soekarno menginginkan untuk para sukarelawan bersatu untuk menakuti musuh. Pembebasan Irian Barat ini juga merupakan upaya mobilisasi rakyat Irian Barat dan pengambilalihan produksi dan distribusi makanan di Irian Barat.¹⁹

Kekuatan militer Indonesia juga didukung oleh penduduk Indonesia yang menjadi sukarelawan dalam

upaya pembebasan Irian Barat. Penduduk yang dikatakan *power* dalam pandangan realisme inilah yang juga menjadi aset perjuangan politik luar negeri Indonesia dalam perjuangan fisik dan konfrontasi. Di bawah komando Soekarno kekuatan-kekuatan penduduk yang sebagai sukarelawan ini digunakan untuk menyelenggarakan pembebasan Irian Barat.

Perjuangan bangsa Indonesia yang berusaha merebut kembali Irian Barat sejak tahun 1949 merupakan perjuangan yang cukup lama.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengupayakan revolusinya sebaik dan sekuat mungkin. Aset-aset kekuatan diplomasi dan militer dikerahkan demi mencapai tujuannya membebaskan Irian Barat dan menuntut kemerdekaan penuh Indonesia.

Dapat dicermati bagaimana konsep *demanding* dalam pandangan realisme politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin adalah pada konfrontasinya terhadap Malaysia. Indonesia mampu mengatasi masalah neokolonialisme Malaysia yang berupa Federasi Malaysia. Dengan menggunakan kekuatan militer dibawah komando *Dwikora* secara militer Indonesia mampu menjaga batas-batas wilayahnya.

Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin menyadari posisinya yang terkepung dan harus mengerahkan segala kekuatannya untuk melindungi diri dari segala bentuk imperialisme dan kolonialisme yang berupaya untuk menghalangi cita-cita bangsa Indonesia meraih kemerdekaan penuhnya. Ancaman-ancaman dari luar seperti dari Malaysia dengan proyek Federasi Malaysia, Indonesia tidak diam namun aktif dari banyak segi demi menghalau dan melawan upaya neokolonialisme Malaysia yang mengancam keamanan nasional Indonesia.

Penduduk yang merupakan salah satu *power* yang dimaksud dalam pandangan realisme, jelas bahwa Indonesia memilikinya. Slogan Ganyang Malaysia menjadi cukup populer kala itu dalam mengobarkan semangat nasionalisme Indonesia. Penduduk Indonesia yang pada waktu itu di seluruh tanah air telah geram dan berusaha melakukan rangkaian unjuk rasa sebagai tuntutan melawan usaha neokolonialisme Malaysia. Bukti nyata adalah adanya demonstrasi anti-Malaysia dimana-mana. Salah satunya adalah rangkaian demonstrasi mengganyang Malaysia di Jakarta di depan gedung kedutaan Malaysia sebagai perlupaan semangat rakyat Indonesia.²¹

¹⁹"Soekarno Talks Action on New Guinea", *The Glasgow Herald*, 27 Desember 1961. hlm. 5. Lampiran 17.

²⁰"Indonesian Off to Visit Holland", *Spokane Daily Chronicle*, 24 Maret 1964. hlm. 2. Lampiran 18.

²¹"Konfrontasi melawan Proyek New Kolonial: Malaysia", *Sketmasa*, 15 September 1963. hlm. 8-9. Lampiran 19.

Meskipun aksi demonstrasi tersebut ada pihak-pihak kontra revolusi yang semakin mengeruhkan suasana, namun pemerintah mampu menertibkan keadaan. Seruan-seruan dari Front Nasional Pusat agar segala tindakan demonstrasi diputuskan dan diorganisir oleh FN, merupakan usaha untuk mencegah jangan sampai terjadi lagi hal-hal liar. Bahkan perusahaan-perusahaan milik Inggris telah diambil alih oleh rakyat Indonesia.²²

Sekali lagi Indonesia memiliki kekuatan-kekuatan yang dapat digunakan dalam mengadakan diplomasi yang ofensif dan kekuatan militer yang mampu menyokongnya sehingga banyak tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam menggalangkan politik luar negerinya.

Realisme dalam politik luar negeri masa Demokrasi Ter[impin juga berciri kekuatan dan ketegasan dimana diplomasinya harus direalisasikan dan bersifat tuntutan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam ketegasan pemerintah RI yang keluar dari PBB dikarenakan PBB malah menjadikan Malaysia sebagai Dewan Keamanan ditengah-tengah masalah konfrontasi Indonesia dan Malaysia.

Pada realisme memang tak harus diwarnai dengan ketegangan karena tidak hanya jalur militer saja yang digunakan sebagai media Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasionalnya di kancan internasional namun kekuatan diplomasi juga harus dicermati. Diplomasi sebagai upaya perundingan-perundingan dan jalur-jalur mediasi non kekerasan yang dapat diambil dalam rangka mempengaruhi pihak-pihak tertentu dalam mewujudkan rencana politik luar negerinya, namun diplomasi yang dimaksud dalam realisme bukan hanya sekadar permintaan melainkan bersifat tuntutan yang menitikberatkan pada ketercapaian tujuan nasionalnya dengan kata lain Indonesia harus bersikap tegas dan setidaknya pasif ofensif (bersiap mempertahankan secara militer) melawan imperialisme dan kolonialisme.

Tuntutan-tuntutan Indonesia pada Belanda, Malaysia dan masyarakat internasional di masa Demokrasi Terpimpinlah yang menjadi ciri utama pandangan realisme dalam politik luar negeri Indonesia. Tanpa adanya tuntutan yang disertai kekuatan yang menyokongnya mustahil Indonesia akan mampu melawan musuh-musuh imperialisme dan kolonialismenya.

Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin didominasi oleh pandangan-pandangan realisme. Hal tersebut jelas berdasarkan bagaimana Presiden Soekarno menyelenggarakan politik luar negeri Indonesia sebagai presiden dan pahlawan tertinggi sejak

dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sikap Indonesia yang tegas melawan imperialisme dan kolonialisme merupakan tujuan dari penyelenggaraan politik luar negeri Indonesia demi mewujudkan cita-citanya yaitu mewujudkan perdamaian dunia yang bebas akan penjajahan. Pandangan dan penyelenggaraan politik luar negeri yang seperti menempatkan Indonesia pada dua kekuatan besar pada waktu itu yaitu Uni Soviet dan Amerika.

Indonesia dengan ikon presiden Soekarno yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasionalnya terutama dalam upayanya mendapatkan kemerdekaan penuh Indonesia dalam hal ini merebut kembali Irian Barat dan menghalau upaya neo-kolonialisme yang digencarkan Malaysia dan Inggris dalam proyek Federasi Malaysia, sikap Indonesia selalu tegas akan imperialisme dan kolonialisme ini telah mendapat perhatian dunia.

Indonesia ikut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut mengakibatkan bahwa politik luar negeri Indonesia secara ke luar merupakan segala kegiatan seperti perundingan-perundingan, kerjasama-kerjasama, persiapan dan rencana yang berupaya untuk ikut andil dalam menciptakan perdamaian dunia. Salah satunya dapat kita cermati dalam isu konferensi Jenewa.

Berbicara mengenai sidang konferensi 10 negara yang akan dibicarakan di Jenewa di mana negara-negara yang menjalankan politik bebas tidak turut serta, Duta Besar Ali Sastroamidjojo katakan, bahwa Indonesia walaupun gembira melihat langkah pertama yang menuju perlucutan senjata itu memandangnya dengan perasaan yang bercampur-campur. Ia katakan, bahwa Indonesia dalam soal perdamaian bukannya bebas, melainkan Indonesia terikat untuk menciptakan perdamaian dunia.²³

Akibat politik bebas aktif Indonesia ini presiden Soekarno dalam dunia internasional dikenal sebagai pelopor *Nefos* yang memperjuangkan penghapusan penjajahan di dunia. Negara-negara di Asia Afrika banyak yang setuju untuk bergabung dalam kesatuan *Nefos* dalam upaya melawan *Oldefos* terutama negara-negara yang baru merdeka. Politik bebas aktif Indonesia diupayakan untuk memerangi imperialisme dan kolonialisme ini mendapat perhatian dan partisipasi dari banyak negara terutama

²²*Ibid.* Hlm. 31-33. Lampiran 11.

²³"Indonesia Tak Tinggal Diam Dlm soal perdamaian dan menciptakan perdamaian", *Merdeka*, 3 November 1959. hlm. 1. Lampiran 20.

negara-negara di Asia Afrika yang sedang mengupayakan kemerdekaan penuh negara dan nasionalisasi bangsanya.

Keaktifan Indonesia dalam kegiatan Konferensi Asia Afrika juga mengakibatkan bertambahnya dukungan dan hubungan baik antara negara Indonesia dengan negara-negara Asia Afrika, terutama dengan negara-negara yang juga memiliki tujuan nasionalnya yaitu menginginkan kemerdekaan penuhnya terhadap negara-negaranya masing-masing dan demi memerangi imperialisme dan kolonialisme. Dukungan-dukkungan dan salah satunya kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara Asia Afrika diselenggarakan berdasarkan atas tujuan yang sama yaitu persahabatan dalam memerangi imperialisme dan kolonialisme.

Jakarta, 15 Juni, Wakil Ketua Komisi A (Luar Negeri) DPR-GR, Selamat Ginting, mengemukakan bahwa untuk melawan dominasi kaum imperialis di bidang ekonomi, makan Konferensi Asia Afrika ke-II di Aljazair juga harus memecahkan masalah kerjasama ekonomi antar negara-negara A-A yang progresif melawan dominasi ekonomi neokolim. Dikatakannya, bahwa pada hakikatnya apabila negara-negara A-A bersatu dan bekerjasama dalam bidang ekonomi ini, maka kaum neokolim tidak akan berjaya lagi mendominir negara-negara A-A.²⁴

Kerjasama-kerjasama antara negara-negara Asia Afrika disongsong dengan upaya perlawanan secara ekonomi terhadap negara-negara neokolim. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama ini dimanfaatkan juga untuk menghipun kawan yang dikonfontasikan melawan imperialisme dan kolonialisme demi mewujudkan revolusi Indonesia. Maka secara internasional terutama oleh negara-negara Asia Afrika maka diharapkan bahwa bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa Asia Afrika mampu memecahkan dan menyelenggarakan hubungan ekonomi yang baik. Di sini jelas bahwa posisi Indonesia cukup kuat di dalam hubungannya dengan negara-negara Asia Afrika terutama dalam *capture*-nya politik bebas aktif Indonesia yang ditujukan untuk melawan musuh imperialisme dan kolonialisme seperti tujuan dari banyak negara-negara Asia Afrika.

Politik luar negeri realisme Indonesia mampu mengupayakan penggunaan aset-aset *power* dalam hal ini adalah militer dan penduduk demi melancarkan perjuangan fisik secara internasional dan demi menjaga keamanan nasionalnya. Hal tersebut dapat terlihat dalam operasi *Trikora* dan *Dwikora* yang telah presiden Soekarno komandokan sebagai upaya konfrontasi fisik dalam merebut kembali Irian Barat dan melawan proyek Federasi Malaysia. Operasi *Trikora* dan *Dwikora* merupakan operasi fisik yang melibatkan penduduk atau rakyat dalam upaya mobilisasi dan kekuatan militer. Pengupayaan ini dilakukan demi kepentingan revolusi Indonesia yang mengakibatkan adanya gejolak dari dalam dan luar Indonesia.

Gejolak yang timbul dalam negara Indonesia salah satunya adalah bahwa rakyat Indonesia sangat antusias dalam upaya-upaya perebutan kembali Irian Barat baik upaya diplomasi dan upaya konfrontasi militer. Banyak sukarelawan-sukarelawan yang digembleng oleh presiden Soekarno demi kepentingan pengamanan dan mobilisasi rakyat Papua. Bukti lainnya adalah geramnya bangsa Indonesia menghadapi proyek Federasi Malaysia sehingga pemerintah dan rakyat mengkampanyekan “Ganyang Malaysia”. Realisasi slogan “Ganyang Malaysia” secara kekuatan fisik dapat kita cermati dalam upaya militer dan mobilisasi rakyat yang dikomandokan presiden Soekarno yang dikenal dengan operasi *Dwikora*.

Sengketa-sengketa Irian Barat dan Federasi Malaysia juga mendapat perhatian dari pihak-pihak luar. Pada masalah Irian Barat pihak seperti Amerika salah satunya juga ikut partisipasi dalam penyelenggaraan mediasi dan upaya-upaya perundingan. Pada masalah Federasi Malaysia pihak luar yang ikut memperhatikan dan berpartisipasi dalam masalah ini adalah Filipina sebagai salah satu contohnya yang juga ikut serta dalam pembicaraan-pembicaraan dan perundingan-perundingan mengenai proyek neo-kolonialisme Malaysia dan Inggris di Asia Tenggara. Filipina secara aktif dengan Indonesia juga mengupayakan perwujudan perdamaian di wilayah Asia Tenggara demi menghalangi proyek Federasi Malaysia yang dapat mengancam perdamaian di antara negara-negara ASEAN.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperpolitikan luar negeri Indonesia merupakan politik yang berdasar akan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Radikal dan revolusioner merupakan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada waktu itu. Penggunaan aset militer dapat dicermati pada *Trikora*

²⁴“Menjongsong Konferensi AA II”, *Suluh Indonesia*, 16 Juni 1965. hlm. 1. Lampiran 21.

dalam upaya pembebasan Irian Barat dan Dwikora dalam konfrontasinya dalam melawan proyek neo-kolonialis Federasi Malaysia.

Realisme sangat kental pada perpolitikan luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Politik luar negeri Indonesia pada waktu itu yang radikal dan revolusiner bersifat banyak tuntutan-tuntutan yang diajukan demi revolusi Indonesia dan kepentingan nasionalnya. Penggunaan *power* seperti penduduk dan militer jelas dapat kita cermati pada Trikora dan Dwikora. Dampak realisme dari politik luar negeri Indonesia jelas dapat dicermati pada posisi Indonesia di kancah perpolitikan internasional yang menempatkan Indonesia pada posisi penting sebagai pelopor gerakan non-blok atau *nefos* demi menciptakan perdamaian dunia dan melawan imperialisme dan kolonialisme.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. pemerintah harus mampu menyelenggarakan perpolitikan luar negeri yang seimbang dan mampu mengupayakan kepentingan-kepentingan nasionalnya secara maksimal dan bebas dari tekanan-tekanan luar;
2. pemerintah juga harus cepat tanggap dan cermat dalam menanggapi isu-isu internasional terutama yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia. Hal tersebut sebagai upaya untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia ikut serta aktif dalam perwujudan perdamaian dunia dan penghapusan penjajahan di dunia.
3. seluruh bangsa Indonesia secara sadar berusaha untuk meningkatkan kualitas SDMnya demi mendapatkan ketahanan di berbagai bidang agar kita mendapat *power* yang cukup sehingga tidak banyak bergantung pada bangsa lain dan mampu bebas dari tekanan-tekanan bangsa lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

Arsip Nasional RI . 4 September 1964. *POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM TJERAMAH J. M. WAKIL P. M. I/MENLU DR. SUBANDRIO DIDEPAN PENDIDIKAN KADER REVOLUSI JANG PERLU DIPELADJARI LEBIH DALAM.*

B. Koran

Lawrence Journal. 3 Januari 1962. *Dutch Proposal Rejected Today*, hlm. 2.

Merdeka. 3 November 1959. *Indonesia Tak Tinggal Diam Dlm soal perdamaian dan mentjicptakan perdamaian*, hlm. 1.

Merdeka. . 30 November 1959. *W. N. Asing Dilarang Memasuki Daerah Hukum Peperda Djakarta*, hlm 1.

Merdeka. 29 April 1960. *Belanda Tempatkan Pesawat2 Hawker Hunter Diperairan Irian Barat*, hlm. 1.

Merdeka. 22 Desember 1961. *Perdjalanannya Presiden Soekarno Adalah Perdjalanannya Kedutaan dan Perdjuaan*, hlm. 1.

Merdeka. 23 September 1963. *Konfrontasi Ekonomi*, hlm. 1.

Merdeka. 30 September 1963. *Politik Luar Negeri Indonesia Perlu Diubah*, hlm. 1.

Merdeka. 17 Maret 1964. *Komando Presiden Soekarno: DAFTARKAN DIRI SEBAGAI SUKARELAWAN UTK MENGGANJANG NEO-KOLONIALIS "MALAYSIA"*, hlm. 1.

Spokane Daily Chronicle. 24 Maret 1964. *Indonesian Off to Visit Holland*, hlm. 2.

Suluh Indonesia. 19 November 1959. *Dasar Negara Sebagai Politik Luar Negeri*, hlm. 3.

Suluh Indonesia. 23 November 1959. *Asing Dilarang Bertempat Tinggal Di Bandung*, hlm. 1.

Suluh Indonesia. 16 Juni 1965. *Menjongsong Konferensi AA II*, hlm. 1.

The Glasgow Herald. 27 Desember 1961. *Soekarno Talks Action on New Guinea*, hlm. 5.

C. Majalah

Sketmasa, 15 September 1963. *Konfrontasi melawan Proyek New Kolonialis: Malaysia*, hlm. 8-9.

Sketmasa. November 1963. *Damai ataukah Perang oleh: Lethan Son*, hlm 13 & 32

Sketmasa. November 1965. *Konfrontasi Pelopor Nefos :Bung Karno Pelopor Oldefos : Johnson*, hlm. 4,5,31,32.

Starweekly. 15 Juni 1959. *Indonesia Bukan Negara Kapitalis Liberal atau Komunis Totaliter*, hlm. 8.

Starweekly. 25 September 1961. *Kekuatan ke-3 Di Dunia: Negara-Negara Non-Blok*, hlm. 30.

Starweekly. 15 Maret 1963. *Pandangan Politik Luar Negeri*, hlm. 7.

D. Buku

Adams, Cindy. 2014. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta: Media Pressindo.

Alam, Wawan Tunggul. 2001. *Bung Karno: Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Amin, Mr. S. 1967. *Indonesia Dibawah Rezim Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Burhanstani, Muhammad. 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Depaertemen penerangan RI. 1962. *Pembebasan Irian Barat: Kumpulan Pidato Presiden Sukarno dan Keterangan-Keterangan Mengenai Perjuangan Pembebasan Irian Barat dari 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1962*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Djamily, H. Bachtiar. 1987. *Bung Karno: Ajarannya dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Biro Ikhwani Suryabana.
- Djoened, Marwati dkk. 2010. *Edisi Pemutakhiran Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faith, Herbert. 1970. *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Penerbit SH.
- Filipovitch, C. N. 1955. *Sedjarah Hubungan Internasional*. Jakarta: PT. Pustaka Rakjat.
- Ricklefs, M.C. 2010. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta : Serambi.
- Green, Marshall. 1992. *Dari Sukarno ke Soeharto*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Guzzini, Stefano. 2002. *Realism in International Relations and International Political Economy*. New York: Routledge.
- Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Penerbit NUANSA.
- Hardiman, F. Budi. 2004. *Filsafat Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harsono, Ganis. 1985. *Cakrawala Politik Era Sukarno*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Jackson, Robert. dan Sorensen, Georg. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kasdi, Aminuddin. 2014. *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*. Surabaya: Unesa University Press.
- Legge, John D. 2003. *Soekarno Biografi Politik*. Jakarta: Penerbit SH.
- Linklater, Andrew. 2000. *International Relations: Critical Concepts in Political Science*. New York: Routledge.
- Magdalena, Merry. 2014. *101 Fakta & Mitos Menggegerkan Seputar Soekarno*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Morgenthau, Hans J dan Kenneth W. Thompson . 2010. *Politik Antarbangsa*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Panitia Penulisan Buku Sejarah Diplomasi Indonesia. 1996. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno. 2001. *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari (Editor Oleh Iman Toto K. Raharjo dan Herdianto WK)*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rezky, Muhammad. 2010. *Pemikiran Soekarno dan Politik Luar Negeri Indonesia 1959-1965*. Jakarta Bumi Aksara.
- Richardson, James L. 2001. *Contending Liberalism in World Politics: Ideology and Power*. Colorado: Lynne Rienner Publisher Inc.
- Ricouer, Paul. 2012. *Teori Interpretasi*. Jogjakarta: Penerbit IRCiSoD
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Rush, James R. 2012. *Jawa Tempo Doeloe 650 Tahun Bertemu Dunia Barat 1330-1985*. Depok: Komunitas Bambu.
- Rutgers, S. J. 2012. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Setyowati, Rr.Nanik dan Maya Mustika K. 2011. *Hubungan Internasional*. Surabaya : Unesa University Press.
- Soemohadiwidjojo, Rhiaen. 2004. *Bung Karno Sang Singa Podium*. Jakarta: Gramedia.
- Sihanouk, Norodom. 1991. *Pemimpin Dunia Yang Terkenal*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1988. *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta: Rajawali.
- Strathern, Paul. 2001. *90 Menit Bersama Kant*. Jakarta: Erlangga.
- Sugijardjo, Slamet. 1995. *Tri Komando Rakyat Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Yani, Mochamad Yanyan dan Ian Montratama. 2017. *Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Weber, Cynthia. 2014. *International Relations Theory: A Critical Introduction (Fourth Editio)*. New York: Routledge.
- Weinstein, Franklin B. 2007. *Indonesian Foreign Policy and The Dilemma of Dependence from Sukarno to Soeharto*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Yupon, S. F. 1960. *Logat USDEK*. Surabaya: Redjeki.

E. Jurnal

Hasnan Habib. *50 Tahun Hubungan Diplomasi Indonesia-Amerika Serikat: Tinjauan Politik Keamanan*

atau militer. Jurnal Studi Amerika, Vol. V,
Agustus-Desember 1999

Yani, Yanyan Mochamad dan Mair. 2010. *Politik Luar Negeri*.
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf
. Diunduh pada 2 Februari 2015 pukul 10.00.

